

Penguatan Kelembagaan Menuju Destinasi Utama



Pendidikan Islam Global

Menyongsong World Class
University



UIN-Maliki Press 2016

**Penguatan Kelembagaan Menuju Destinasi Utama
Pendidikan Islam Global
Menyongsong World Class University**

Tim Penulis

© UIN-Maliki Press 2014

Tim Penulis : Wahidmurni
Abbas Arfan
Isti'anah Abubakar
Suhartono
Nur Ali
Khoirul Hidayah
Agung Sedayu
Halimi Zuhdy
Dr.Hj.Umrotul Khasanah, M.Si.

Editor: Zaenal Habib
Ahmad Ghozi

Design: Robait Usman

UMP 14009
Cetakan I: 2014
Cetakan II: 2015
Cetakan III: 2016
ISBN 978-602-142605-0

All right reserved

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi
buku ini dengan cara apapun, tanpa izin tertulis dari Penerbit

Diterbitkan pertama kali oleh
UIN-MALIKI PRESS (Anggota IKAPI)
Unit Penerbitan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Jalan Gajayana 50 Malang 65144,
Telepon/Faksimile (0341) 573225
E-mail: uinmalikipress@gmail.com,
Website:<http://press.uin-malang.ac.id>

Kata Pengantar

Pendahuluan

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang **berdiri** berdasarkan Surat Keputusan Presiden No 50 tanggal 21 Juni 2004. Bermula dari sebuah Fakultas Tarbiyah, cabang IAIN Sunan Ampel Surabaya yang berdiri pada 1961. Lembaga ini beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang pada pertengahan 1997, bersamaan dengan beralihnya status kelembagaan semua fakultas cabang di lingkungan IAIN se-Indonesia yang berjumlah 33 buah, melalui Surat Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1997. Sejak saat itu pula STAIN Malang lepas dari IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Sebagaimana tercantum dalam Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Malang Nomor 5 Tahun 2005, Universitas ini memiliki **visi** menjadi universitas Islam terkemuka dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kekokohan aqidah, kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional, dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bercirikan Islam serta menjadi penggerak kemajuan masyarakat.

Misi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang adalah (a) mengantarkan mahasiswa memiliki kekokohan aqidah dan kedalaman spiritual, keluasan ilmu dan kematangan

profesional; (b) memberikan pelayanan dan penghargaan kepada penggali ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang bercirikan Islam, (c) mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pengkajian dan penelitian ilmiah, dan (d) menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia.

Adapun **tujuan** penyelenggaraan pendidikan tinggi ini adalah: (a) menyiapkan mahasiswa agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan budaya yang bercirikan Islam, dan (b) mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan budaya yang bercirikan Islam, dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan dimaksud, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang telah menetapkan **Rencana Strategis** (Renstra) Pengembangan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang 25 Tahun ke Depan (2006—2030). Secara khusus penyusunan Renstra ini bertujuan untuk lebih mengarahkan program universitas dalam rangka peningkatan **mutu, relevansi, dan daya saing** di tengah percaturan global. Renstra tersebut merupakan kelanjutan dan pengembangan dari Renstra yang telah dibuat sebelumnya, yakni Renstra Pengembangan STAIN Malang 10 Tahun ke depan. *Renstra* sebelumnya dipandang telah berhasil mengantarkan kampus ini berubah statusnya menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang sehingga mendapat perhatian dari lembaga keuangan internasional, *Islamic Development Bank* (IDB) berupa bantuan pembangunan kampus yang sangat megah.

Pada intinya, Renstra ini **berisi** perencanaan strategis pengembangan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik

Ibrahim Malang 25 tahun ke depan yang diarahkan pada tiga tahapan mendasar sebagai berikut: *Pertama*, dalam jangka pendek (2006—2010) untuk mencapai kemantapan kelembagaan (*institutional establishment*) dan penguatan akademik (*academic reinforcement*). *Kedua*, dalam jangka menengah (2011—2020) untuk mencapai posisi universitas agar lebih dikenal dan diakui di tingkat regional (*Regional Recognition and Reputation*); dan *Ketiga*, dalam jangka panjang (2021—2030) untuk mencapai posisi puncak universitas, yakni agar lebih dikenal dan diakui di tingkat internasional (*International Recognition and Reputation*).

Masa pengembangan jangka pendek Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan masa pemantapan akademik (*academic establishment*) yang memberikan landasan untuk berkembang sebagai universitas terkemuka di tingkat regional, khususnya negara-negara sahabat (Islam). Pada akhir masa pengembangan jangka pendek, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang bisa menyelenggarakan perkuliahan untuk 12.000 mahasiswa secara layak, yang tersebar ke dalam 30 Program Studi Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor. Kebijakan umum pengembangan jangka pendek diarahkan pada pemenuhan kelayakan dan baku-mutu universitas unggulan (*excelent university*) sehingga memberi peluang untuk dikenal sebagai universitas dengan reputasi regional.

Sembilan(9)bidangyangmenjadifokuspengembanganuniversitas meliputi: pendidikan dan pengajaran, penelitian dan penerbitan, pengabdian pada masyarakat, ketenagaan, kemahasiswaan, kelembagaan, kerjasama, prasarana dan sarana, dan keuangan.

Sasaran utama dari bidang pendidikan dan pengajaran adalah terintegrasinya sistem pendidikan Islam, sains, teknologi, dan seni. Untuk mencapai sasaran tersebut program yang ditetapkan meliputi penataan kurikulum untuk peningkatan mutu berkelanjutan, penyempurnaan kurikulum untuk memperkuat kekhususan dan

relevansi, penataan dan peningkatan fungsi pembelajaran, penataan dan pemenuhan standar penyelenggaraan program pendidikan sarjana sesuai dengan keperluan dunia kerja, pengembangan dan peningkatan kualitas program terpilih S-1 dan diploma dalam menyambut globalisasi, serta pembinaan suasana akademik.

Sasaran utama bidang penelitian dan penerbitan adalah meningkatnya kualitas, kuantitas dan sarana penelitian; serta meningkatnya kuantitas dan status akreditasi jurnal dan penerbitan. Dalam mencapai sasaran dimaksud program yang ditetapkan meliputi peningkatan kualitas, kuantitas peneliti dan sarana penelitian; peningkatan penelitian untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dasar; peningkatan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian dan industri maju; peningkatan sumbangsih penelitian pada pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; peningkatan penyebarluasan hasil penelitian melalui media komunikasi ilmiah; peningkatan kualitas dan kuantitas jurnal ilmiah; dan peningkatan kualitas dan kuantitas penerbitan buku ilmiah.

Sasaran utama bidang pengabdian masyarakat adalah meningkatnya jumlah dan mutu program pengabdian pada masyarakat. Dalam mencapai sasaran dimaksud program yang ditetapkan meliputi penyelenggaraan kerjasama dengan industri dan lembaga relevan untuk peningkatan kemampuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kerjasama perguruan tinggi untuk mendukung pengembangan usaha; pelatihan dan pendidikan ulang bagi tenaga kerja di instansi, lembaga dan industri; penyebarluasan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemanfaatan masyarakat, dan pengkajian dan pengembangan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Integratif (PKLI).

Dalam bidang ketenagaan ditetapkan program-program yang meliputi pendidikan lanjut tenaga dosen; pembinaan tenaga administratif; pendidikan lanjut laboran, teknisi, dan pustakawan;

peningkatan kompetensi dosen, laboran, teknisi, dan pustakawan; dan promosi jabatan fungsional dosen.

Dalam bidang kemahasiswaan ditetapkan program-program yang meliputi pendidikan al-Qur'an dan kitab klasik Islam, pendidikan dan pelatihan keustadzan untuk mahasiswa, pengembangan mekanisme penerimaan mahasiswa baru, pengembangan organisasi dan jaringan alumni, pembinaan bakat dan minat mahasiswa, peningkatan kesejahteraan mahasiswa, dan sistem pelayanan data dan informasi.

Sasaran utama bidang kelembagaan adalah terakreditasinya semua jurusan secara bertahap hingga peringkat A, dan terselenggaranya jurusan atau program studi sebagaimana digariskan dalam *body of knowledge* universitas, serta terbentuknya pusat-pusat kajian dan pengembangan, pusat-pusat studi, pusat-pusat layanan, dan laboratorium. Dalam mencapai sasaran dimaksud ditetapkan program-program yang meliputi pengembangan Fakultas Tarbiyah, pengembangan Fakultas Syari'ah, pengembangan Fakultas Humaniora dan Budaya, pengembangan Fakultas Psikologi, pengembangan Fakultas Ekonomi, pengembangan Fakultas Sains & Teknologi, menyiapkan berdirinya Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan dan infrastruktur pendukungnya, pengembangan Program Pascasarjana, optimasi fungsi Penjaminan Mutu Pendidikan, pemberdayaan perpustakaan; pembentukan pusat penunjang (kajian, penerbitan, kerjasama dan laboratorium), pusat komputer dan sistem informasi setiap fakultas, dan Lembaga Audit Universitas(LAU).

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang saat ini menuju usianya yang ke-10 tahun, sejak ditetapkannya Surat Keputusan Presiden No 50 tanggal 21 Juni 2004 lalu. Selama masa kurang dari dasawarsa ini UIN Maulana Malik Ibrahim terus berbenah dan mengembangkan jati dirinya sebagai perguruan tinggi yang bercita-cita menjadi perguruan tinggi Islam terdepan dan masuk

kategori perguruan tinggi kelas dunia (*World Class University*). Tentu, menjadi bagian dari *World Class University* (WCU) tidak mudah tanpa melalui proses panjang dan berbagai prestasi yang dicapai, plus modal komitmen yang tinggi dari sivitas akademikanya.

Saat ini UIN Maulana Malik Ibrahim terus mengawal 9 (Sembilan) Garis Besar Haluan Universitas (GBHU) yang telah dicanangkan sejak awal berdirinya, yaitu: 1). Implementasi Integrasi Sains dan Islam; 2). Pemantapan Kebijakan Universitas Bilingual; 3). Pemantapan Peran Ma'had dan HTQ; 4). Internasionalisasi Universitas melalui perluasan jaringan kerjasama internasional; 5). Pengembangan Dosen dan Mahasiswa; 6). Revitalisasi Peran Sosial Keagamaan Universitas melalui Lemlit dan LPM; 7). Pengembangan Kelembagaan (Pengembangan Fakultas Ilmu Kesehatan); 8). Pengembangan Manajemen; 9). Penguatan sumber pembiayaan pendidikan (*Fund Rising*).

Saat ini dua Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di Indonesia, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah ditunjuk oleh Menteri Agama, Suryadharma Ali untuk mempersiapkan diri menjadi PTAIN kelas dunia (*world class university*). Penunjukan Menteri kepada dua PTAIN ini tentu bukan tidak beralasan, namun didasarkan pada pertimbangan dan musyawarah dengan berbagai pihak dan pertimbangan prestasi yang diraih oleh kedua UIN selama ini.

Tentu, bagi kedua PTAIN yang mendapatkan kepercayaan Pemerintah ini juga tidak sekadar bangga dan senang, namun ini merupakan tantangan dan sekaligus ujian yang harus dihadapi secara serius. Sebab, menjadi Perguruan Tinggi yang masuk dalam kategori *World Class University* menuntut persyaratan yang maksimal dan komprehensif, mencakup berbagai aspek. Hal ini tentu membutuhkan kerja keras dan profesional dari sivitas akademikanya. Namun, jika PTAIN sudah dapat masuk dalam peta dunia, atau daftar *World Class*

University, maka ini merupakan sejarah baru bagi bangkitnya dunia pendidikan Islam. Tentu, ini bukan harapan sekelompok umat Islam Indonesia saja, namun seluruh umat Islam di dunia.

Sebagaimana yang dirilis Reuters (www.huffingtonpost.com/2013/10/12/best-universities-in-the-world_n_4032309.html), bahwa saat ini universitas-universitas di Asia telah dapat bersaing dengan 50 universitas-universitas terkemuka di Barat, termasuk Inggris dan Amerika Serikat. Universitas di Jepang, Korea Selatan, China dan Singapura umumnya naik dalam indeks tahunan yang berpotensi menggeser prestasi Barat.

Selama ini peringkat Universitas Dunia masih didominasi oleh Amerika Serikat dan Inggris, yang bersama-sama memegang *top ranking* 13. Amerika Serikat memiliki 77 top ranking 200 dan California Institute of Technology (Caltech) mengambil posisi teratas untuk tahun kedua berturut-turut. Sementara itu banyak universitas di Eropa mengalami penurunan. Tahun ini hanya universitas di Swedia, Denmark dan Norwegia yang mengalami peningkatan.

Peringkat yang disusun menggunakan data dari Thomson Reuters mempertimbangkan reputasi lembaga di kalangan akademisi, rasio staf, jumlah mahasiswa dan dana penelitian yang berasal dari industri. Proporsi terbesar dari ranking universitas ketiga berasal dari seberapa sering perguruan tinggi tersebut memiliki penelitian yang dikutip oleh akademisi luar.

Reasoning WCU

ADA pertanyaan yang muncul dalam konteks rencana UIN masuk dalam *World Class University* ini: apakah jika UIN masuk *World Class University* (WCU) tidak akan menghilangkan karakteristik dan nilai-nilai Islam-nya, alias sekuler? Pertanyaan ini lumrah dan bisa dimaklumi, sebab selama ini segala sesuatu yang berbau Barat selalu dipertanyakan atau dikonotasikan negatif, atau paling tidak harus dicurigai, begitu kira-kira. Ya, pertanyaan yang serupa juga terjadi

di saat STAIN atau IAIN mau berubah menjadi UIN, ada semacam kekhawatiran dengan segala sesuatu yang berubah.

Pengakuan standar internasional bagi sebuah institusi diukur dengan menggunakan parameter kemajuan dan prestasi yang dimiliki oleh institusi itu sendiri. Bagi perguruan tinggi, parameter itu meliputi: SDM, (mahasiswa dan dosen), riset yang dikembangkan, lulusan yang dibutuhkan oleh pasar, karya ilmiah yang dipublikasikan dan bermanfaat untuk kepentingan umat, dan sejumlah prestasi akademik lain. Untuk mencapai ke arah itu diperlukan tradisi dan nilai-nilai yang perlu dikembangkan, seperti nilai disiplin, etos kerja yang tinggi, trampil, komitmen, objektif, mencintai ilmu dan seterusnya.

Jika kriteria dan nilai-nilai di atas yang digunakan, maka sesungguhnya peluang untuk mencapai ke sana tidak terlalu sulit, sebab nilai-nilai di atas sudah *inherent* dalam doktrin ajaran Islam yang mesti diamalkan. Bahkan, budaya mutu itu sendiri sudah ditekankan sejak awal, bahwa orang Islam mesti melakukan pekerjaan yang terbaik, berkualitas (*ahsanu 'amala*) dan bermanfaat untuk arang lain (*anfa'uhum li al-nas*).

Menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh sebagian kalangan akan kekhawatiran lunturnya nilai-nilai Islam setelah menjadi WCU, justru sebaliknya, bahwa nilai-nilai keislaman akan terlihat nyata di ruang publik jika dapat meraih kategori *international class*. Selain itu, ilmu yang dikembangkan di UIN Maliki Malang mengikuti paradigma *teo-antroposentris* yang memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan universal dan berbasis pada al-Qur'an dan al-Sunnah. Prinsipnya, tetap memelihara tradisi (*turas*) masa lalu yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik (*al-muhafadat ala 'l-Qadim as-Salih wa 'l-akhzu bi 'l-Jadid al-Aslah*).

Indonesia merupakan negara yang menempati posisi terbesar jumlah penduduk muslimnya. Tetapi potensi mayoritas muslim tersebut belum menjamin peran sosialnya. Hal ini tentu terkait dengan soal

pendidikan. Apakah pendidikan yang dikembangkan oleh umat Islam sudah memenuhi fungsi dan sasarannya? Karena itu, seperti yang diungkap oleh Kuntowijoyo (1994:350), bahwa pendidikan tinggi Islam saat ini --sebagaimana pendidikan tinggi lainnya-- secara empirik belum mempunyai kekuatan yang berarti karena pengaruhnya masih kalah dengan kekuatan-kekuatan bisnis maupun politik. Disinyalir, bahwa pusat-pusat kebudayaan sekarang ini bukan berada di dunia akademis, melainkan di dunia bisnis dan politik. Dalam *setting* seperti ini lembaga pendidikan tinggi Islam terancam oleh subordinasi. Karena, hingga saat ini masih ditengarai bahwa sistem pendidikan Islam belum mampu menghadapi perubahan dan menjadi *counter ideas* terhadap globalisasi kebudayaan.

Menjadi perguruan tinggi yang masuk kategori *world class* tentu akan menepis anggapan di atas dan merupakan jawaban kongkret terhadap pertanyaan itu. Secara konseptual sebetulnya bagi orang Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan hal yang baru --apalagi asing-- melainkan merupakan bagian yang paling dasar dari kemaajuan dan pandangan dunianya (*world-view*). Oleh sebab itu tidaklah mengherankan jika ilmu memiliki arti yang sedemikian penting bagi kaum muslimin pada masa awalnya, sehingga tidak terhitung banyaknya pemikir Islam yang larut dalam upaya mengungkap konsep ini. Konseptualisasi ilmu yang mereka lakukan nampak dalam upaya mendefinisikan ilmu yang tiada habis-habisnya, dengan kepercayaan bahwa ilmu tak lebih dari perwujudan "memahami tanda-tanda kekuasaan Tuhan", seperti juga membangun sebuah peradaban yang membutuhkan suatu pencarian pengetahuan yang komprehensif.

Dunia pendidikan tinggi Islam saat ini harus mampu menjawab dua persoalan penting: globalisasi dan kompetisi. Bahwa globalisasi merupakan realitas yang tidak dapat dihindari, dan dalam kondisi seperti ini terjadi kehidupan yang sangat kompetitif, jika tidak mampu berkompetisi maka akan tertinggal dengan sendirinya. Oleh sebab itu

penguasaan IPTEK mutlak diperlukan. Namun di sisi lain, kemajuan IPTEK itu sendiri jika tidak diimbangi oleh kekuatan iman dan moral, akan membawa madharat besar bagi kehidupan di muka bumi ini. Kehadiran pendidikan tinggi agama Islam dalam kancah *World Class* di sini kemudian menjadi penting dan berarti bagi membawa kemajuan dunia dengan tetap memperhatikan nilai-nilai etisnya, semoga.

Buku yang berjudul: **Penguatan Kelembagaan Menuju Destinasi Utama Pendidikan Islam Global Menyongsong World Class University** ini, merupakan kumpulan tulisan para Dosen UIN Maliki Malang dengan beragam perspektifnya. Oleh karena itu, atas terbitnya buku ini saya menyambut gembira dan sekaligus bangga atas prestasi yang mereka ukir dan capai. Semoga buku ini sangat berguna dan berkontribusi bagi pengembangan wawasan akademik dan kelembagaan. Kepada tim editor dan penerbit UIN Maliki Press saya mengucapkan terima kasih, semoga Allah Swt selalu memberikan segala kemudahan atas usaha-usaha yang telah kita lakukan, *amin....*

Malang, 9 Juni 2014

M. Zainuddin

Daftar Isi

Psesmen Kebutuhan Pengembangan Kurikulum Program
Studi Menuju World Class University (WCU) dalam Prespektif
Penyiapan Sumber Daya Manusia Unggul

■ Wahidmurni ~ 1

MENYONGSONG WORLD CLASS UNIVERSITY: Dengan
Pendekatan Integrasi-Interkoneksi atau Islamisasi Ilmu
Pengetahuan?

■ Abbas Arfan ~ 17

MENJADIKAN ULUL ALBAB SEBAGAI PIJAKAN MENUJU
WORLD - CLASS UNIVERSITIY

■ Isti'anah Abubakar ~ 39

MEMBANGUN RISET KOLABORASI DI UIN MAULANA
MALIK IBRAHIM MALANG UNTUK MENJADI WORLD CLASS
UNIVERSITY

■ Suhartono ~ 53

MANAJEMEN KURIKULUM INTEGRATIF FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM

■ Nur Ali ~ 65

KETENTUAN AKSES PASAR GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES (GATS) DALAM SISTEM REGULASI PENGUSAHAAN JASA KEPELABUHANAN DI INDONESIA

■ Khoirul Hidayah ~ 83

PENGEMBANGAN KONSEP GREEN HIGHWAY DAN GREEN TERMINAL UNTUK MASA DEPAN

■ Agung Sedayu ~ 105

SASTRA DAN INTERNASIONALISASI UIN MALIKI MALANG (MENGURAI AWAN, MEMPURNAMAKAN DUNIA)

■ Halimi Zuhdy ~ 129

UIN MALIKI MENUJU WORLD CLASS UNIVERSITY:
Membingkai Bonus Demografis dan Tantangan Perekonomian Global

■ Umrotul Khasanah ~ 141

MANAJEMEN KURIKULUM INTEGRATIF FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM

■ **Nur Ali**

(Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)

A. Pengantar

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) sebagai salah satu fakultas yang berada di lingkungan perguruan tinggi agama islam (PTAI) masih menghadapi tantangan dikhotomi kelembagaan dan kurikulum karena itu FITK perlu mencari system pendidikan sintesis dari berbagai system pendidikan yang telah ada selama ini yaitu pendidikan terpadu yang lebih menitikberatkan pada aspek keseimbangan antara afektif, kognitif, dan psikomotorik, serta memadukan secara harmonis trilogy pendidikan yaitu pendidikan formal, non-formal dan informal. Secara filosofis, fungsi pendidikan adalah membina peserta didik melalui proses mental dan rasional agar memiliki martabat yang mulia. Secara sosiologis, pendidikan memiliki dua fungsi pokok yaitu fungsi manifes dan fungsi laten (Sonhadji, 2000:6). Fungsi manifes pendidikan adalah mengajar materi spesifik bagi peserta didik, seperti membaca, menulis, dan keterampilan akademik lainnya. Sedangkan fungsi laten adalah mengajar keterampilan dan sikap sosial, seperti disiplin diri, kerjasama dengan orang lain, mentaati hukum, dan bekerja keras untuk mencapai suatu tujuan. Kedua fungsi tersebut memainkan peran yang vital dalam mewujudkan integrasi fungsional masyarakat serta mempertahankan struktur sosial yang ada.

Secara ekonomis, fungsi pendidikan adalah memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja yang ada termasuk tenaga kependidikan, karena pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh investasi modal, tetapi juga tenaga kerja yang memiliki fleksibilitas dalam menguasai keterampilan baru untuk melaksanakan pekerjaan baru, sejalan dengan perubahan struktur ekonomi dan lapangan kerja. Sonhadji, (2000:7) menyimpulkan bahwa negara-negara dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, memiliki tingkat income yang lebih tinggi pula.

Untuk mewujudkan fungsi-fungsi pendidikan dan meningkatkan kualitas generasi bangsa masa depan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan, yang antara lain berusaha memperbaiki kurikulum dan sistem evaluasi, seperti misalnya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Kepmendiknas) Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, yang kemudian disusul dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi, dan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

B. Kebijakan Pemerintah di Bidang Kurikulum Pendidikan Tinggi

Kebijakan tentang kurikulum perguruan tinggi sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pasal 97 ayat (1), (2), dan (3) sebagai berikut;

(1) kurikulum perguruan tinggi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi; (2) kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk setiap program studi di perguruan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh tiap-tiap perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan; (3) kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi elemen

kurikulum meliputi; (i) landasan kepribadian, (ii) penguasaan ipteks dan atau olahraga, (iii) kemampuan dan keterampilan berkarya, (iv) sikap dan prilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai, dan (v) penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

DikalanganPTAI,kebijakantentangkurikulummemunculkan berbagai tanggapan sebagai bentuk respon. Tanggapan tersebut juga sekaligus sebagai wujud dari komitmen para pejabat atau ahli pendidikan di lingkungan PTAI untuk lebih meningkatkan mutu PTAI. Menurut Direktur Pertais (dalam Furchan, dkk. 2005:33) mutu lulusan PTAI dianggap masih kurang memenuhi harapan masyarakat, dan sumbangannya pada pengembangan ilmu agama Islam dianggap kurang signifikan. Hal tersebut antara lain disebabkan karena kelemahan kurikulum PTAI, yaitu; (1) kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat, yakni banyak program studi yang tidak diminati masyarakat tetap dipertahankan; (2) kurang efektif, yakni tidak menjamin dihasilkannya lulusan yang sesuai dengan harapan; (3) kurang efisien, yakni banyaknya mata kuliah dan sks tidak menjamin dihasilkannya lulusan yang sesuai harapan; (4) kurang fleksibel, yakni PTAI kurang berani secara kreatif dan bertanggungjawab mengubah kurikulum guna menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat (setempat, nasional atau global); dan (8) hubungan fungsional antar mata kuliah yang mengacu pada tujuan kurikuler kurang jelas.

Untuk mengatasi berbagai kelemahan tersebut, maka Direktur Pertais mengambil kebijakan tentang pengembangan kurikulum PTAI, yaitu: (1) kurikulum berbasis hasil belajar; (2) kurikulum terdiri atas kurikulum inti dan kurikulum institusional; (3) kurikulum inti (40 %) ditetapkan oleh pemerintah dan berlaku secara nasional, sedangkan kurikulum institusional (60 %) ditetapkan oleh PTAI dan berlaku hanya di PTAI tersebut; (4) kurikulum secara

keseluruhan (inti dan institusional) ditetapkan oleh PTAI; dan (5) kualitas kurikulum menjadi tanggungjawab PTAI (Furchan, dkk. 2005:33). Kebijakan tersebut mengandung makna bahwa: (1) kurikulum perlu dikembangkan dengan lebih menitikberatkan pada pencapaian target kompetensi dari pada penguasaan materi; (2) lebih mengakomodasikan keragaman kebutuhan dan sumberdaya pendidikan yang tersedia; (3) memberikan kebebasan yang lebih luas kepada pelaksana pendidikan di PTAI untuk mengembangkan dan melaksanakan program pendidikan sesuai dengan kebutuhan; (4) menggunakan prinsip kesatuan dalam kebijakan dan keragaman dalam pelaksanaan.

Hamalik (2006:4) juga menyatakan bahwa kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat dan mutu pendidikan menuntut adanya pengembangan kurikulum, sedangkan pengembangan kurikulum yang bertujuan untuk meningkatkan relevansi program pendidikan dapat dicapai melalui pengembangan kurikulum daerah dan sekolah/ perguruan tinggi serta melibatkan peran serta *stakeholder*. Dalam penjelasan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga dijelaskan bahwa pembaharuan kurikulum secara diversifikasi dimaksudkan untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenjang pendidikan dilakukan secara profesional, pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi.

Dengan demikian dalam pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum diperlukan kemampuan manajerial dalam implementasi kurikulum karena kurikulum merupakan perangkat lunak yang memberi arah dan menentukan kualitas dan kuantitas produk pendidikan. Untuk itu kurikulum memiliki fungsi untuk memberi arah segala bentuk kegiatan pendidikan dan pembelajaran kepada pencapaian tujuan-tujuan pendidikan dan pembelajaran. Hasil penelitian Ghony (2004) tentang perkembangan kurikulum Fakultas Tarbiyah Institut Agama

Islam Negeri Sunan Ampel di Malang tahun 1960-1995 menemukan beberapa temuan penelitian, di antaranya; (1) Komponen kurikulum yang mengalami perubahan adalah komponen tujuan yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan guru agama di sekolah agama dan di sekolah umum; (2) komponen kurikulum strategi pembelajaran yang mengalami perubahan adalah komponen kegiatan belajar mengajar; (3) komponen evaluasi hasil belajar sebagai salah satu komponen pelaksanaan kurikulum yang pada awalnya berbentuk kenaikan tingkat berubah menjadi hasil penugasan mandiri, tugas terstruktur, non struktur dan hasil-hasil diskusi.

Berdasarkan pada pemikiran di atas dapat dikatakan bahwa untuk memperbaiki mutu FITK PTAI perlu ditekankan pada perbaikan manajemen kurikulum dan pembelajaran. FITK yang manajemen kurikulum dan pembelajarannya baik diasumsikan dapat meningkatkan prestasi belajar mahasiswanya dan berimplikasi pada peningkatan mutu pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah. Adanya FITK yang mampu di satu pihak, dan ada FITK yang kurang mampu di pihak lain, dalam menghasilkan lulusan yang berprestasi menunjukkan keragaman kemampuan dalam manajemen kurikulum, manajemen SDM dan manajemen sumber daya lainnya dalam kegiatan pembelajaran. Karena itu manajemen kurikulum integratif FITK pada PTAI yang memiliki program studi agama dan umum seperti UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sangat penting bagi pengembangan keilmuan, terutama setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pasal 97 ayat (1), (2), dan (3) mengenai kurikulum pendidikan tinggi.

C. Kurikulum FITK PTAI

Pada umumnya, aspirasi umat Islam dalam pengembangan program studi pada FITK dan atau pada PTAI pada mulanya didorong oleh beberapa tujuan, yaitu: (1) untuk melaksanakan

pengkajian dan pengembangan ilmu-ilmu agama Islam pada tingkat yang lebih tinggi secara lebih sistematis dan terarah; (2) untuk melaksanakan pengembangan dan peningkatan dakwah Islam; dan (3) untuk melakukan reproduksi dan kaderisasi ulama dan fungsionaris keagamaan, baik pada kalangan birokrasi negara maupun sektor swasta, serta lembaga-lembaga sosial, dakwah, pendidikan dan sebagainya (Nur Ali, 2010:34).

Pada perkembangan selanjutnya terdapat kecenderungan kecenderungan baru untuk merespon berbagai tuntutan dan tantangan yang berkembang di masyarakat. Beberapa kecenderungan tersebut antara lain menyangkut:

Pertama, tuntutan akan studi keislaman yang mengarah pada pendekatan *non-mazhabi*, sehingga menghasilkan pemudaran *sektarianisme*. Adanya perkuliahan Perbandingan Mazhab, Masail al- Fiqh, Pemikiran dalam Islam (ilmu Kalam, Filsafat Islam, dan Tasawuf), dan Perkembangan Pemikiran Modern di Dunia Islam, merupakan upaya pengembangan wawasan terhadap khazanah pemikiran ulama-ulama terdahulu untuk dikaitkan dengan problem, tuntutan dan tantangan perkembangan zaman, dan sekaligus sebagai upaya melakukan pemudaran *sektarianisme* tersebut.

Kedua menyangkut pergeseran dari studi keislaman yang bersifat normatif ke arah yang lebih historis, sosiologis dan empiris. Upaya ini diwujudkan antara lain dalam bentuk perpaduan antara empirik dan sumber wahyu untuk saling mengontrol, dalam arti wahyu mengontrol untuk menghasilkan teori yang kredibel dan bermanfaat, dan dalam waktu yang sama hasil empirik akan mengontrol proses memahami wahyu. Dan *Ketiga*, menyangkut orientasi keilmuan yang lebih luas.

Dalam konteks yang ketiga tersebut, jika mencermati tujuan pengembangan program studi pada perguruan tinggi Islam yang *pertama* di atas, maka pemahaman tentang ilmu-ilmu agama Islam tidak terlepas dari suasana historis yang mengitari *the founding*

fathers-nya, yaitu mereka yang masih berhadapan dengan problem dikotomi ilmu pengetahuan, sehingga demarkasi ilmu hanya dilihat dari sumbernya, apakah ia bersumber dari wahyu (*naqli*) atau rasional manusia (*aqli*), yang pada gilirannya masing-masing berkembang sendiri-sendiri tanpa ada kaitan secara terpadu.

Perkembangan yang pesat di bidang iptek agaknya menimbulkan kesenjangan antara iman dan intelek atau antara ilmu pengetahuan yang bersumber dari wahyu dan yang bersumber dari upaya manusia, yang pada gilirannya menimbulkan pecahnya kepribadian manusia melalui berbagai sikap yang berlawanan dan bahkan konflik-konflik yang tajam. Fenomena semacam itu juga menjadi perbincangan dalam Konperensi Dunia Kedua mengenai Pendidikan Islam yang diselenggarakan di Islamabad pada tahun 1980. Konperensi ini antara lain memberikan rekomendasi agar ilmu pengetahuan rasional diajarkan dari sudut pandang Islami secara terintegrasi. Untuk itu perlu reformulasi, rekonstruksi dan restrukturisasi kurikulum pada masing-masing fakultas./ jurusan/ program studi dengan berbagai pendekatan pengembangan kurikulum yang digunakan.

D. Manajemen kurikulum integratif FITK

1. Kurikulum integratif

Kurikulum yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (UU No. 20/2003). Sedangkan kurikulum integratif yaitu kurikulum yang mengintegrasikan sejumlah disiplin keilmuan melalui isi kurikulum, keterampilan-keterampilan, dan tujuan-tujuan yang bersifat afektif. Tujuan utama dari kurikulum integratif yaitu mengintegrasikan sejumlah materi kurikulum dan komponen-komponen pembelajaran dengan benar-benar menghilangkan batas-batas diantara berbagai mata kuliah atau berbagai disiplin keilmuan.

Frazee, B.M, dan Rudnitski, R.A, (1995;133) mendefinisikan kurikulum integratif sebagai berikut;

Integrated curriculum; curriculum that integrates a number of disciplines through content, skills, and affective goals..... A main purpose of an integrated curriculum is to integrate a number of curricular and instructional elements across disciplines.

Hal senada juga dinyatakan oleh Murdoch, K. (1998) *Theoriests... argue that skills, values, and understandings are best taught and assessed within meaningful “connected” contexts*

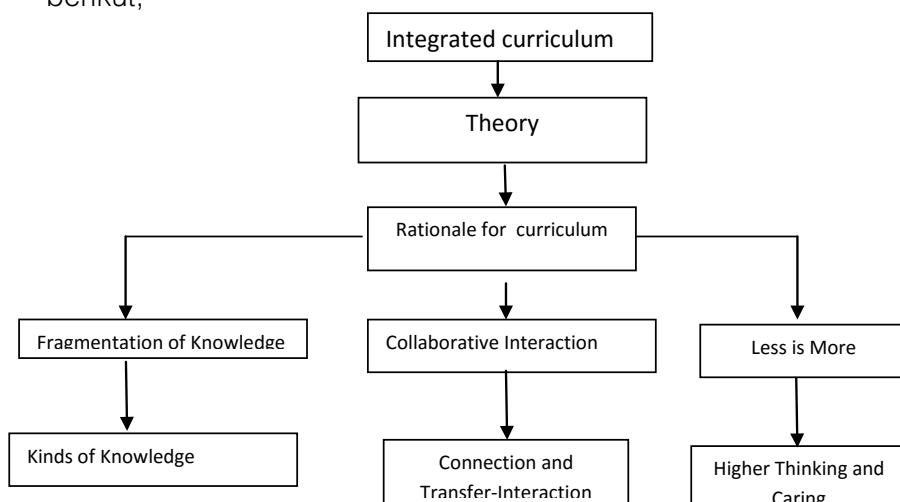
Kebutuhan untuk mengembangkan kurikulum integratif pada pendidikan tinggi disebabkan oleh adanya tuntutan kebutuhan masyarakat dan perkembangan iptek. Sumardi, Mantan Direktur Diperta Depag dalam Mukti Ali (1996:210-251) menyatakan dalam suasana yang semakin kompetitif khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan kemampuan-kemampuan intelektual lainnya, para sarjana IAIN adalah yang banyak menderita kekurangan. Karena pada umumnya pendekatan kurikuler di IAIN masih sangat doktriner dan dogmatis dan sarjana Agama itu belum banyak “ber-try-out” dalam berbagai kesempatan. Sedangkan Ma’arif (1993) mengungkapkan bahwa kaitan antara pendidikan Islam dan konsep Ilmu, setidak-tidaknya ada tiga persoalan pokok yang saling beraitan yang dapat dijabarkan menjadi; (i) sosok muslim yang menjadi luntang-lantung bila dihadapkan kepada persoalan-persoalan dunia yang selalu berubah dan menantang tampaknya disebabkan oleh idapan krisis identitas diri, sedangkan system pendidikan dan kurikulum pendidikan islam yang sedang berlalu tidak dapat menolong keadaan, (ii) kegiatan pendidikan islam di bumi haruslah berorientasi ke langit--suatu orientasi transcendental agar kegiatan itu punya makna spiritual yang mengatasi ruang dan waktu, dan (iii) perlunya dilakukan redefinisi ulama. Dari persoalan ini, A. Syafi’l Ma’arif mengajukan pertanyaan; dapatkah IAIN menggiring kampusnya untuk melahirkan para ulama’ yang benar-

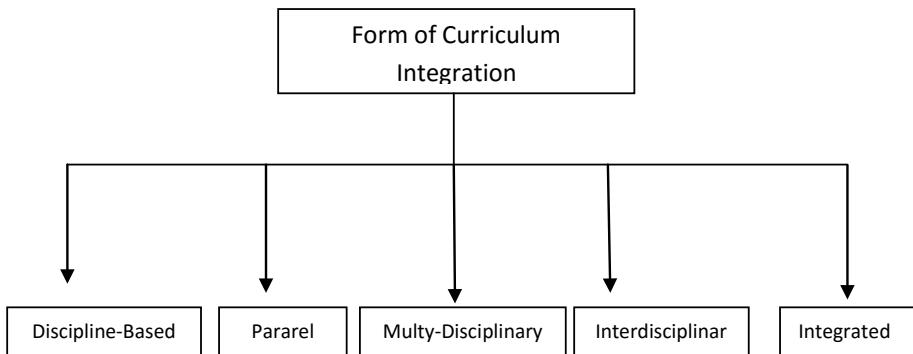
benar secara intelektual punya kepedulian terhadap tuntutan dan perkembangan zaman.

Hasil penelitian Djunaidi Ghony tahun 2004 studi kasus pada Kurikulum Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel di Malang tahun 1960-1995 menemukan beberapa temuan, di antaranya yaitu; (1) komponen kurikulum yang mengalami perubahan adalah komponen tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan guru agama di sekolah agama dan di sekolah umum; (2) komponen kurikulum strategi pembelajaran yang mengalami perubahan adalah komponen kegiatan belajar mengajar; dan (3) komponen evaluasi hasil belajar yaitu evaluasi kurikulum yang pada awalnya dalam bentuk kenaikan tingkat berubah menjadi hasil penugasan mandiri, tugas terstruktur, non struktur dan hasil-hasil diskusi.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa manajemen pengembangan kurikulum integratif pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan merupakan keniscayaan terutama yang ada di perguruan tinggi agama yang di dalamnya terdapat program studi umum dan studi agama.

Fazee, B.M, dan Rudnitski, R.A, (1995) mengklasifikasikan kurikulum integratif sebagaimana yang digambarkan sebagai berikut;





2. Manajemen Kurikulum Integratif FITK PTAI

Manajemen kurikulum adalah keseluruhan proses untuk memilih orang-orang serta mengalokasikan sarana dan prasarana untuk menunjang tugas orang-orang itu dalam mengimplementasikan kurikulum di lapangan. Gibson (dalam Syaiful, 2000;49-50) menyatakan bahwa semua kegiatan manajerial yang dilakukan untuk mewujudkan kegiatan yang direncanakan menjadi suatu struktur tugas, wewenang dan menentukan siapa yang akan melaksanakan tugas tertentu untuk mencapai tugas yang akan diinginkan organisasi. Manajemen kurikulum dapat diartikan sebagai proses di mana pekerjaan diatur dan dialokasikan di antara para anggota sehingga tujuan dari kurikulum itu dapat tercapai secara efektif.

Nanang Fatah (2001;72) mengklasifikasikan lima tahapan dalam proses manajemen. *Pertama*, menentukan tugas-tugas apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan kurikulum. *Kedua*, membagi seluruh beban kerja menjadi kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perseorangan atau perkelompok dengan mendasarkan pada kualifikasi tertentu. *Ketiga*, menggabungkan pekerjaan para anggota dengan cara yang rasional, efisien. *Keempat*, menetapkan mekanisme kerja untuk mengkoordinasikan pekerjaan dalam satu kesatuan yang harmonis. Dan *kelima*, melakukan monitoring dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan dan meningkatkan efektifitas.

Berdasarkan pada pemikiran di atas dapat dikatakan bahwa keefektifan dalam manajemen kurikulum integratif FITK dapat menggambarkan ketepatan pembagian tugas, hak, tanggungjawab, hubungan kerja bagian-bagian, dan menentukan personal untuk melaksanakan tugasnya. Dalam kegiatan manajemen kurikulum terdapat beberapa kegiatan yaitu; (1) mengidentifikasi pekerjaan yang akan dilakukan, (2) membagi pekerjaan ke dalam tugas-tugas tertentu, (3) mengelompokkan tugas dalam pekerjaan, (4) menentukan petugas yang diperlukan, (5) menentukan tugas/pekerjaan yang harus dilaksanakan, (6) mengatur personil, fasilitator-fasilitator dan sumber-sumber lain (Sutopo (1998;16).

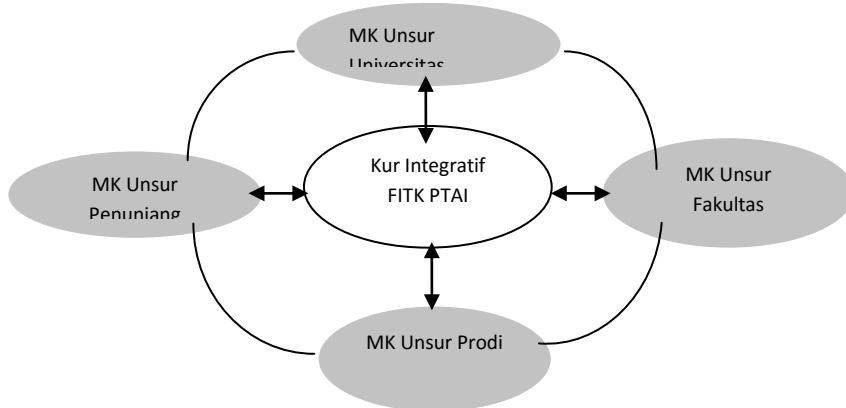
Dengan demikian dapat diformulasikan bahwa manajemen kurikulum integratif yaitu suatu usaha untuk menstrukturkan atau menetapkan kerja sama di antara orang-orang dalam kelompok, yang meliputi menetapkan tugas, wewenang, tanggung jawab, serta hubungan masing-masing dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran serta evaluasi pembelajaran sebagai satu kesatuan dalam kegiatan kurikulum.

Berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran sebagai satu kesatuan dalam manajemen kurikulum, Gorton (1991:64-65) menyatakan bahwa perencanaan harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: *(1) what need to be done ?, (2) which resources are needed to do the job, and within which period of time, ? (3) who is competent, interested, and available to do the job ?, (4) what responsibilities need to be assigned to whom?, (5) which tasks and people need to be related to each other in some manner ?, (6) who should be in authority over whom?, (7) who should supervise whom and in which area?, 8) who should communicate with whom and about what, (9) which standards determine effectiveness?* karena kurikulum merupakan salah satu komponen pendidikan. Ada tiga pendekatan yang dapat dijadikan dasar dalam manajemen kurikulum integratif FITK. **Pertama**, pendekatan kebutuhan sosial

(*social demand approach*) yaitu pendekatan yang didasarkan atas keperluan masyarakat pada saat ini. Pendekatan ini menitikberatkan pada tujuan pendidikan yang mengandung misi pendidikan. **Kedua**, pendekatan ketenagaan (*manpower approach*) yaitu pendekatan yang mengutamakan keterkaitan lulusan sistem pendidikan dengan tuntutan akan kebutuhan tenaga kerja. Jika dikaji dari semakin membengkaknya angka pengangguran, maka keperluan mempertemukan kepentingan pendidikan dan pembelajaran di FITK dengan dunia kerja semakin mendesak. Dan **ketiga**, pendekatan *cost effectiveness* yang menitikberatkan pada pemanfaatan biaya secermat mungkin untuk mendapatkan hasil pendidikan yang seoptimal mungkin, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Dalam manajemen kurikulum integratif, ada dua model yaitu (i) model blok dan (ii) model *simbiosis-mutualisme*.

Pertama, model blok yaitu materi kurikulum dikelompokkan ke dalam berbagai kelompok paket blok yang akan disampaikan kepada peserta didik tertentu pada jenjang pendidikan tertentu. Proses integrasi kurikulumya didasarkan pada orientasi masing-masing program studi dan atau jurusan dan kemudian dikelompokkan menjadi satu blok kurikulum seperti misalnya program studi untuk PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Model Manajemen kurikulum integratif FITK ini dapat dijumpai pada UIN dimana didalamnya terdapat berbagai jenjang pendidikan mulai PAUD, PGMI, Program studi umum dan program studi agama. Proses Manajemen kurikulum integratif Model Blok ini dapat digambarkan sebagai berikut;



Gambar 1: Manajemen kurikulum integratif FITK *Model Blok*

Proses manajemen kurikulum integratif FITK Model Blok ini dapat dijumpai pada Fakultas Tarbiyah UIN Maliki Malang yang di dalamnya ada program studi PGMI, Program studi umum dan program studi pendidikan agama dan International class Program (ICP).

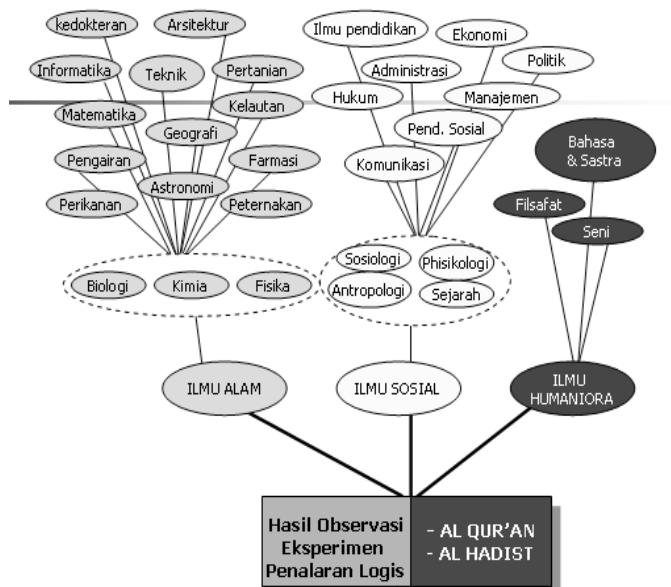
Kedua, model *simbiosis-mutualisme* yaitu materi kurikulum disusun dan dikembangkan bersama-sama secara multy dan interdisipliner untuk mencapai standar kompetensi tertentu atau standar kompetensi lulusan lembaga pendidikan. Proses integrasi kurikulumya adalah dengan mengaitkan materi kurikulum baik materi yang berupa konseptual, teori, fakta, prosedural, nilai yang ada pada intra dan/atau antar kompetensi dasar dan kemudian digabungkan dan/atau dilebur ke dalam satu kompetensi dasar dan/ atau standar kompetensi tertentu atau standar kompetensi lulusan lembaga pendidikan. Seperti misalnya kompetensi dasar tertentu yang ada pada mata kuliah biologi dikaitkan dengan kompetensi dasar yang ada pada mata kuliah sosiologi, pendidikan agama, atau studi al-qur'an, studi al-hadits, Studi fikih dan kemudian digabungkan dan/atau dilebur menjadi satu kompetensi dasar tertentu dan/atau suatu standar kompetensi untuk mencapai standar kompetensi

lulusan dan misi-visi lembaga pendidikannya.

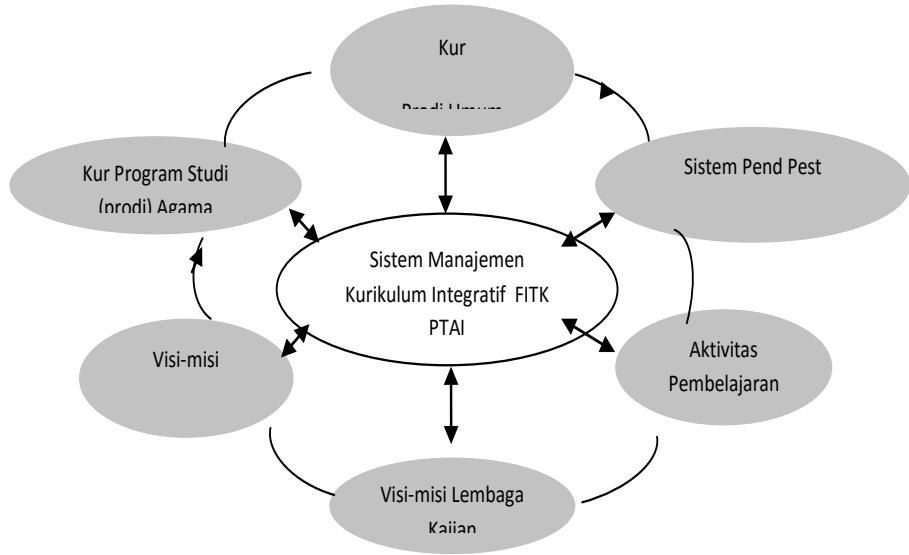
Implementasi Model manajemen kurikulum integratif ini dapat dijumpai pada perguruan tinggi yang memiliki Fakultas Saintek, Fakultas ilmu Sosial, Fakultas Agama, program studi umum, program studi agama, lembaga-lembaga kajian/pusat studi, dan pesantren atau asrama. Seperti misalnya Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim (MALIKI) Malang.

Penyelenggaraan pendidikan-pengajaran dan pelatihan yang mendasarkan pada kurikulum integratif model "symbiosis-mutualisme" pada semua program studi dan lembaga-lembaga kajian atau pusat-pusat studi yang ada di lingkungan suatu perguruan tinggi biasanya berada di bawah koordinasi Wakil Rektor bidang Akademik dan kelembagaan (WR 1).

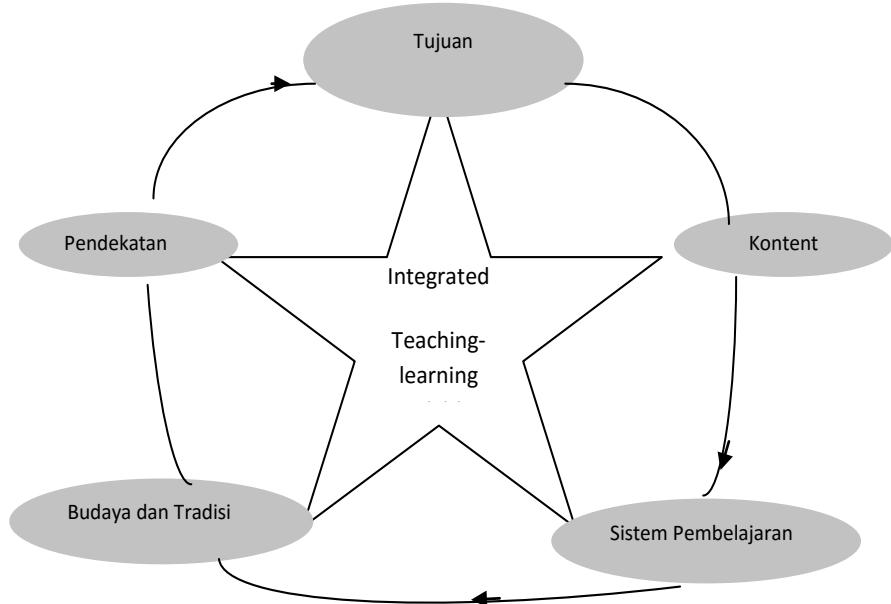
Implementasi kurikulum integratif Model model *symbiosis-mutualisme* ini dapat digambarkan sebagai berikut;



Gambar 2: Manajemen kurikulum integratif *Model symbiosis-mutualisme* pada tingkat *body of knowledge* pada UIN MALIKI Malang (Suprayoyo, 2005:23)

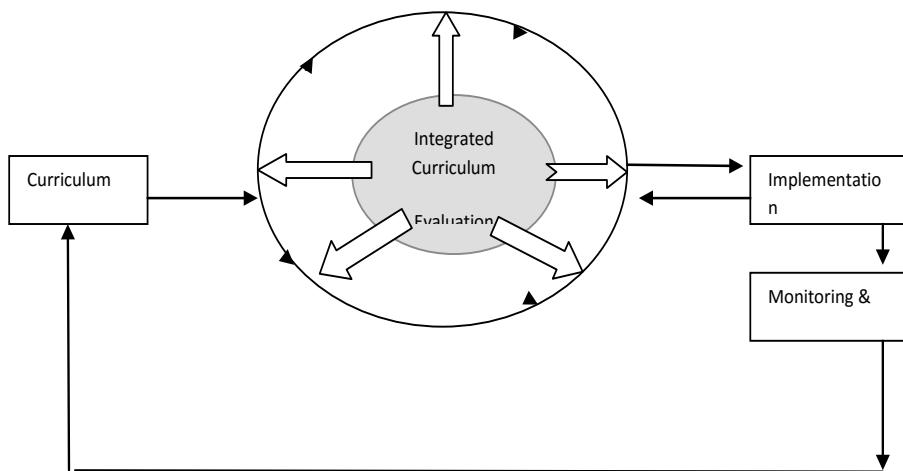


Gambar 3: Manajemen kurikulum integratif FITK *Model simbiosis-mutualisme* pada tingkat kelembagaan



Gambar 4: Manajemen kurikulum integratif FITK *Model simbiosis-mutualisme* pada Desain kegiatan pembelajarannya

Aims, Goals and Objectives



Gambar 5: Manajemen kurikulum integratif FITK *Model simbiosis-mutualisme* pada tingkat evaluasi kurikulumnya

D. Penutup

Tulisan ini mencoba untuk menawarkan suatu model manajemen kurikulum integratif FITK pada PTAI yang memiliki program studi Agama dan Umum. Dari tulisan ini diharapkan mendapatkan masukan korektif serta menjadi inspirasi dan bahan diskusi untuk pengembangan kurikulum integratif pada lembaga-lembaga pendidikan terutama yang menggunakan "*boarding school system*" karena undang-undang RI No. 20/ 2003 tentang system pendidikan nasional memaknai kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan kurikulum integratif yaitu kurikulum yang mengintegrasikan sejumlah disiplin keilmuan melalui isi kurikulum, keterampilan-keterampilan, dan

tujuan-tujuan pendidikan secara holistik. Untuk itu tujuan utama dari kegiatan pengembangan kurikulum integratif yaitu mengintegrasikan sejumlah materi kurikulum dan komponen-komponen pendidikan dan pembelajaran dengan melewati adanya pembatasan berbagai disiplin keilmuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dirjen. Binbaga Islam (1997), Materi rapat Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dengan Rektor dan Dekan Fakultas Daerah, Jakarta: Dirjen. Binbaga Islam Depag RI.
- Fatah, Nanang. 1996. *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya
- Frazee, B & Rudnitski, 1995, Integrated Teaching Methods, New York: Delmar Publishers
- Furchan, A. dkk. 2005. *Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi di PTAI*. Yogjakarta: Pustaka Pelajar
- Gorton, R.A., 1976. *School Administration Challenge and Opportunity for Leadership*. New York: Brown Company Publishers.
- Hamalik, O., 2006. *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, Bandung: Rosdakarya
- Ma'arif, A Syafi'i (1993), Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia, Bandung: Mizan, Cet. I.
- Murdoch, K. 1998. Classroom Connections: Strategic for Integrating Learning, Australia: Eleanor Curtain Publishinh
- Nur Ali, 2010. 2010. Implementasi Kurikulum Integratif UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Studi Kasus Pada Fakultas Sains Dan Teknologi UIN Maliki Malang. Lemlitbang UIN Maliki Malang.

Undang-Undang Republika Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakatra: Departemen Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah RI, Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Jakarta: Kemendiknas

Supraoyo, I. 2005. Paradigma Pengembangan keilmuan di Perguruan Tinggi: Konsep Pendidikan Tinggi yang dikembangkan UIN Malang. Malang: UIN-Press.

Sonhadji, A., 2000. *Alternatif Penyempurnaan Pembaharuan Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan*. Makalah disajikan pada Seminar Pengkajian Pendidikan Kejuruan dan Teknologi, tanggal 23 oktober 2000. Jakarta: Balitbang Depdiknas

Sonhadji, A., 2006, Politik dan Pendidikan. *Pena Pendidikan*, 6(1):26.